

SKRIPSI

***Civil Society* dalam Kontestasi Politik Elektoral**

**Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny
Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 &
2020**



Disusun Oleh:

ACHMAD GAZALI NUR MA'ARIEF

E11116302

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**CIVIL SOCIETY DALAM KONTESTASI POLITIK ELEKTORAL
STUDI KASUS : RELASI POLITIK PEMUDA PANCASILA dan
DANNY POMANTO pada PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2018 & 2020**

Disusun dan diajukan Oleh:

ACHMAD GAZALI NUR MA'ARIEF

(E111 16 302)

Telah diperiksa dan diujikan

Makassar, 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 196212311990031023

Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.Si
NIP.199205022019044001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral

**Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto
pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 & 2020**

Disusun dan Diajukan Oleh :


ACHMAD GAZALI NUR MA'ARIEF


E11116302

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. Andi Yakub, M.Si. P.hD 

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP 

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si 

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A. 

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Gazali Nur Ma'arief
NIM : E11116302
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral. Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 & 2020” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Achmad Gazali Nur Ma'arief

ABSTRAK

Achmad Gazali Nur Ma'arief. NIM E111 16 302. Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral. Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 & 2020. Di bawah bimbingan Drs. H. A. Yakub, M.Si, PhD dan Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.

Civil Society lahir dari Gerakan terorganisir masyarakat yang mengedepankan sifat mandiri serta tidak memiliki ketergantungan terhadap negara ataupun aktor politik dengan tujuan untuk memastikan pemerintah melahirkan kebijakan yang adil terhadap segala lapisan masyarakat. Sayangnya Civil Society sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai alat politik praktis dalam kontestasi politik electoral dimana dalam penelitian ini relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila Kota Makassar dengan Danny Pomanto. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila dengan Danny Pomanto serta posisi Civil Society dalam kontestasi politik electoral dengan menggunakan Pilwali sebagai arena pengujian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan analisis terkait bagaimana relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila dengan Danny Pomanto pada dua kontestasi politik electoral di Kota Makassar serta bagaimana Civil Society dalam hal ini Pemuda Pancasila memposisikan diri dalam politik praktis. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yang sekiranya dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah Teori yang dikemukakan oleh Adam Ferguson yakni Civil Society yang dibantu dengan beberapa konsep teori terkait Relasi Politik Civil Society Organization.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa model relasi politik yang dibangun antara Pemuda Pancasila dengan Danny Pomanto memiliki dua bentuk utama yakni relasi klientelistik dan model relasi personal. Kedua model relasi politik ini berjalan tidak sesuai dengan paham Civil Society yang mengedepankan sifat kemandirian dan mitra kritis pemerintah. Relasi politik ini dibangun atas 3 faktor utama yakni factor Kekuasaan, Kesejahteraan (Uang) dan relasi pribadi. Kondisi ini kemudian mempengaruhi peran dan fungsi Pemuda Pancasila sebagai organisasi Civil Society.

Kata kunci : Civil Society, Relasi Politik, Pemuda Pancasila, Danny Pomanto.

ABSTRACT

Achmad Gazali Nur Ma'arief. NIM E111 16 302. Civil Society in Electoral Political Contest. Case Study: Political Relations of Pemuda Pancasila and Danny Pomanto in the 2018 & 2020 Makassar Mayoral Election. Under the guidance of Drs. H. A Yakub, M.Si, P.hD and Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP.

Civil Society was born from an organized community movement that prioritizes independence and does not have dependence on the state or political actors with the aim of ensuring that the government produces policies that are fair to all levels of society. Unfortunately, this condition is often used by certain parties as a practical political tool in electoral political contests where in this study the political relations built by Pemuda Pancasila with Danny Pomanto. So that in this study, the subject of discussion is how the political relations built by Pemuda Pancasila with Danny Pomanto and the position of Civil Society in electoral political contestation using the Elections as a testing arena.

This study aims to describe and provide an analysis of how the political relations built by Pemuda Pancasila with Danny Pomanto in two electoral political contestations in Makassar City and how Civil Society in this case Pemuda Pancasila positions itself in practical politics. The type of research used is qualitative research. Data collection was carried out by interviewing several informants who could answer the problem formulation which was the subject of discussion in this study. The theory used is the theory put forward by Adam Ferguson, namely Civil Society which is assisted by several theoretical concepts related to Political Relations of Civil Society Organizations.

The results of this study found that the political relationship model built between Pemuda Pancasila and Danny Pomanto has two main forms, namely clientelistic relations and personal relations models. These two models of political relations are not in accordance with the understanding of Civil Society which emphasizes the nature of independence and critical partners of the government. This political relationship is built on 3 main factors, namely the factor of Power, Welfare (Money) and personal relations. This condition then affects the role and function of Pemuda Pancasila as a Civil Society organization.

Keywords: Civil Society, Political Relations, Pancasila Youth, Danny Pomanto.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral. Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 & 2020”**. Salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis melalui sosok orang tua yang senantiasa menjadi peluk terhangat bagi penulis. Budirman Bachtiar sosok ayah terbaik yang selalu sabar menghadapi penulis serta menjadi tameng yang selalu melindungi penulis. Alm. Jumriah Yahya ibu yang kasih sayangnya masih penulis rasakan sampai sekarang, doa terbaik untukmu di surga ibu. Bapak dan Ibuku tercinta, sejatinya doa-doa kalianlah yang telah mendorong penulis untuk terus melangkah hingga sejauh ini. Kepada kedua saudari penulis Siti Fatimah Nur Syachriani dan Siti Hajar Nur Mutmainnah yang terus memberikan dukungannya meski kadang menyebalkan. Kepada Alm. Bachtiar Achsya dan I Sayang yang telah merawat dan memberikan perhatian yang begitu hangat kepada penulis sewaktu kecil. Dan seluruh keluarga besar H. Haddade dan keluarga besar Yahya yang selalu mendoakan dan membantu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si. PhD selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si,**

Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh pegawai dan staf fakultas serta staf dan pegawai departemen ilmu politik yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
6. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar serta memberikan penulis keluarga kecil di kampus. Untuk semua makna yang terekam dalam memori, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.
7. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 2016** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini, kalian luar biasa.
8. Kepada saudara saudaraku **Reformasi16**. Kalian mungkin terkadang menyebalkan, tapi ketahuilah bahwa kalian telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan penulis di dunia kampus.
9. Kepada teman-teman **KKN Posko Tibojong, Group Pisang, Celalu Ceria, Pripol, Bikin Apa Malam Ini, Pemadam Kelaparan, Secret Damai**, terimakasih atas canda, tawa, duka, serta semua pelajaran hidup yang penulis dapatkan.

10. Kepada **Widya Astuti** terima kasih atas kesediaannya bersama-sama berjalan selangkah demi selangkah menuju ketakterbatasan dan melampauinya. Serta terima kasih atas segala bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu persatu,

DAFTAR GAMBAR

Gamba2.1.....	35
Gambar5.1.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Makassar	49
--	----

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Literatur Review.....	11
2.2 Civil Society.....	16
2.2.1 Ciri-Ciri Civil Society.....	19
2.2.2 Elemen-Elemen Dalam Civil Society.....	21
2.2.3 Civil Society dan Politik Arus Bawah.....	24
2.3 Civil Society Organization.....	27
2.4 Relasi Politik CSO dengan Institusi dan Aktor Politik.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran.....	37

2.7 Skema Pikir.....	40
BAB III	
METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Sumber Data Penelitian.....	42
3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	44
3.4.2 Arsip dan Dokumen	45
BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	46
4.2 Profil Moh. Ramdhan Danny Pomanto	50
4.3 Sejarah dan Perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila	54
BAB V	
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	59
5.1 Dinamika Relasi Politik Pemuda Pancasila Kota Makassar dan Danny Pomanto	59
5.1.1 Model Relasi Klientelistik	65
5.1.2 Model Relasi Personal.....	69
5.2 Faktor yang Mempengaruhi Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto	77
5.2.1 Faktor Kekuasaan	79
5.2.2 Faktor Kesejahteraan (Finansial).....	82
5.2.3 Relasi Pribadi Erwin Hatta dengan Danny Pomanto	86
5.3 Posisi Pemuda Pancasila dalam Dinamika Demokrasi.....	90
5.3.1 Independensi Pemuda Pancasila sebagai CSO	91
5.3.2 Dampak Relasi Politik terhadap Peran dan Fungsi Pemuda Pancasila sebagai CSO.....	95
BAB VI	
PENUTUP	99

6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak dapat menyangkali dirinya sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk berkumpul. Sejak zaman pramodern, manusia memiliki unit organisasi yang bersifat kin selection, yaitu kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan yang cenderung berdasarkan ikatan dan bersifat resiprositas, yaitu cenderung menolong sesama karena saling membutuhkan. Karakteristik ikatan seperti ini yang cenderung kuat pada masyarakat dengan pola interaksi yang masih menjunjung tinggi nilai dan norma tradisional.

Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.

Salah satu bentuk nyata dari pemberian ruang perjuangan untuk masyarakat adalah Civil Society. Diskursus terkait implementasi Civil Society di negara dengan iklim demokrasi sejatinya telah mengalami pasang surut. Keberadaan Civil Society dianggap sebagai sesuatu yang

natural dan lahir atas proses interaksi dari masyarakat dalam ruang public yang bebas dan dijamin oleh Negara (Demokrasi). Indonesia sampai hari ini menjadi salah satu negara yang dianggap menarik untuk melihat keberadaan dan perkembangan dari Civil Society. Tidak semata-mata berdasarkan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar tapi juga faktor lain seperti keberagaman kelompok, konflik golongan dan ideologi serta sejarah Panjang pergerakan politik nasional.

Civil Society sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Dari sudut pandang institusional, Civil Society juga diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat yang secara aktif dan bebas mengawal segala problematika kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya. Secara kedudukan, Civil Society menempatkan dirinya tidak sama dengan negara melainkan sebagai sebuah kekuatan penyeimbang guna menghindari dominasi kuasa.

Civil Society kemudian memanifestasikan dirinya dalam wujud kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau dalam pandangan Civil Society disebut dengan Civil Society Organization (CSO). CSO ini berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan

program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. Organisasi ini sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Ormas dalam pandangan civil society memegang peranan penting sebagai sebuah pilar penunjang berdirinya iklim demokrasi yang baik karena dianggap mampu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Layaknya sebuah masyarakat yang bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, kelompok-kelompok yang berpengaruh pun terus mengalami perubahan dan bahkan mampu bekerja secara massif untuk kemenangan kandidat dalam kontestasi politik electoral. Hal ini kemudian didukung oleh organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila yang memiliki sumber daya manusia berupa tokoh-tokoh kemasyarakatan yang berpengaruh serta kuatnya struktur dari ormas tersebut hingga ke berbagai pelosok wilayah.

Hadirnya CSO sendiri tidak jarang mengalami perubahan implementasi dan secara terang-terangan terjun dalam politik praktis. Arena yang konkrit untuk menguji kerja politik praktis dari CSO adalah arena Pemilu. Dalam penelitian ini lebih tepatnya Pemilihan Walikota Makassar. Pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2018 merupakan sebuah gambaran akan terjadinya fenomena politik baru. Pasangan

Munafri Arifuddin dengan A. Rachmatika Dewi yang diusung oleh 10 partai politik terbukti gagal memenangkan kontestasi. Proses politik di Indonesia yang menjadikan partai politik sebagai mesin kemenangan utama telah mengalami kemunduran pada fenomena tersebut. Berkurangnya dominasi partai politik pada kontestasi politik electoral merupakan dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan kader-kadernya. Kemunduran tersebut kemudian menjadi celah bagi organisasi-organisasi non partai termasuk CSO untuk turut bersaing dalam kontestasi politik electoral.

Di Kota Makassar sendiri terdapat banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang turut andil pada kontestasi politik electoral. Pemuda Pancasila adalah satu organisasi kemasyarakatan yang pergerakannya begitu massif dalam memenangkan pasangan Danny Pomanto. Proses mobilisasi politik yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila terbukti efektif dalam menggalang dukungan bagi Danny Pomanto. Berbagai aksi besar-besaran dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ini yang seolah memperlihatkan kekuatan politiknya pada arena politik electoral.

Pemuda Pancasila selayaknya sebuah CSO sejatinya memiliki dasar perjuangan pengawalan ideologi dan kepentingan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Organisasi ini lahir sebagai upaya penyeimbang dan membantu pemerintah dalam merawat nilai Pancasila. Tujuan mulia yang sebagaimana dalam anggaran dasar dituangkan

bahwa tujuan organisasi adalah untuk menjamin dan mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejatinya dalam anggaran dasar dan rumah tangga Pemuda Pancasila, telah tergambarkan dengan jelas posisi organisasi ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam teori Civil Society.

Meskipun dalam perjalanannya, organisasi kemasyarakatan ini dijadikan sebagai salah satu kekuatan pokok dalam kontestasi politik electoral karena memiliki massa yang besar serta terkenal dengan kader-kadernya yang militant sehingga proses mobilisasi politik dapat berlangsung dengan efektif, hal tersebutlah yang diharapkan dapat mendatangkan perolehan suara yang signifikan kepada kandidat. Organisasi kemasyarakatan juga dipandang efektif karena struktur yang terbangun menjaring semua kalangan masyarakat dari yang bawah hingga masyarakat kalangan atas dengan solid. Dengan jumlah basis massa yang besar dan terkenal militant, organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Makassar menjadi salah satu kunci Danny Pomanto untuk bersaing pada politik electoral atau kontestasi pemilihan walikota Makassar.

Danny Pomanto mampu secara maksimal memanfaatkan kekuatan politik non partai dalam menarik pendukung. Pemuda Pancasila dijadikan sebagai salah satu kekuatan pokok dalam pemilihan walikota tahun 2018 dan pada pemilihan walikota Kota Makassar tahun 2020 kembali memperlihatkan dukungannya. Organisasi kemasyarakatan pemuda

Pancasila dikenal memiliki kader yang loyal dan militan dalam bergerak menjalankan apapun perintah organisasi. Selain kader yang mumpuni, organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila juga mempunyai struktur besar yang terbangun di berbagai lini di masyarakat. Seperti diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila mempunyai kepengurusan sampai pada tingkat RT/RW.

Pemuda Pancasila sendiri sudah getol dalam mendukung dan memenangkan Danny Pomanto sejak pemilihan walikota 2018 silam. Erwin Hatta selaku ketua organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila telah menyatakan dukungan terhadap Danny Pomanto. Ketua ormas Pemuda Pancasila ini bahkan menegaskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa Pemuda Pancasila Makassar telah final dan tidak dapat dipecah belah.¹ Yang menarik adalah dinamika yang muncul pada kubu Pemuda Pancasila tahun 2020, dimana MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan dan MPC Pemuda Pancasila Kota Makassar secara organisasi menyatakan dukungannya terhadap Appi, namun proses kerja politik praktis yang dilakukan justru memperlihatkan sebaliknya. Kerja-kerja dukungan politik yang dilakukan Pemuda Pancasila justru berbalik mendukung Danny Pomanto.

Hubungan yang dibangun antara Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto dilihat penulis sebagai perjalanan Panjang dalam menumbuhkan

¹ Pilkada.rakyatku.com, <http://pilkada.rakyatku.com/read/86502/2018/02/08/pemuda-pancasila-harqa-mati-dukung-diami> diakses pada tanggal 1 juli 2020.

ikatan emosional yang lebih kuat antara satu sama lain. Sebuah proses yang berujung padahal lahirnya rasa kepercayaan (trust) yang merupakan sebuah komponen penting dalam modal sosial. Trust ini kemudian menjelma dalam bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari dengan keyakinan. Memberikan aksi nyata dalam membentuk kesepakatan akan tujuan besar secara kolektif antara kedua pihak, yang secara terang-terangan terus digaungkan dalam berbagai aksi yang dilakukan pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020.

Organisasi pemuda Pancasila juga diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Hadirnya tokoh-tokoh masyarakat dalam organisasi membuat pengaruh Pemuda Pancasila semakin besar. Berbagai faktor pendukung tersebut membuat Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang mampu memberi dampak besar dalam proses-proses mobilisasi politik. Dengan modal kekuatan sosial yang besar, pemuda Pancasila memainkan perannya dalam arena pertarungan kekuatan-kekuatan sosial politik.

Kehadiran Pemuda Pancasila dalam kontestasi politik electoral tidak terlepas dari proses pemenuhan tujuan organisasi. Kedua pihak sejatinya melihat peluang dengan membangun relasi politik yang kokoh guna memenangkan kontestasi yang berujung pada pengawalan aspirasi kelompok. Aktivitas Gerakan Pemuda Pancasila sering diidentikkan dengan radikalisme yang bermakna sebagai Gerakan yang menolak atau

kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap timpang. Dalam gerakannya, kita seringkali menemukan kombinasi spontanitas yang emosional serta didukung oleh masyarakat meski hanya dalam jangka waktu yang pendek dengan gambaran nasib masa depan yang lebih baik. Aktivitas-aktivitas pemuda Pancasila memang dapat dengan mudah menggandeng masyarakat untuk bergabung dan bergerak bersama.

Pemuda Pancasila mampu melahirkan partisipasi masyarakat yang berdampak pada tumbuhnya angka partisipasi politik yang diharapkan. Tingginya dukungan masyarakat dalam memilih kotak kosong pada pemilihan walikota kota Makassar kemarin merupakan bentuk nyata akan pengaruh politik pemuda Pancasila. Tidak berhenti pada Pilwali 2018, Gerakan ini Kembali mempertontonkan kebolehannya dalam Pilwali 2020. Kondisi ini sejatinya menimbulkan suatu tanda tanya terkait masa depan relasi politik yang dibangun oleh Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto. Proses dalam mewujudkan kepentingan kelompok diharapkan berujung pada pengaruh yang dibawa dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga relasi politik akan terus terjaga. Berbagai kondisi serta faktor menguntungkan yang dimiliki pemuda Pancasila ditambah dengan masyarakat yang resah akan partai politik membuat jalannya mobilisasi politik semakin efektif.

Berdasarkan analisis singkat dari penulis atas beberapa fakta dan realitas yang terjadi, kondisi ini kemudian menjadi menarik untuk melihat

implementasi dari civil society dalam panggung persaingan politik electoral terkhusus melihat relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila dan Danny serta bagaimana relasi politik ini mempengaruhi independensi Pemuda Pancasila. Maka penulis menarik untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul:

“*Civil Society* dalam Kontestasi Politik Elektoral

Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny

Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 & 2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menekankan pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi politik yang dibangun oleh Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto di Pilwali Makassar 2018 & 2020 ?
2. Bagaimana Civil Society menempatkan diri dalam kontestasi politik electoral ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto pada Pilwali Makassar 2018 & 2020.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana relasi politik mempengaruhi peran civil society organization ?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yakni :

1 Manfaat Akademik

- a. Menjadi literatur atau bahan referensi untuk bahan kajian lanjutan mengenai peran organisasi masyarakat dalam melakukan mobilisasi politik serta relasi antara penguasa dan organisasi masyarakat .
- b. Menjawab secara ilmiah fenomena sosial dan politik mengenai relasi politik organisasi Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto di Pilwali Makassar 2018 & 2020 serta memberikan penjelasan ilmiah terkait peran civil society dalam kontestasi politik electoral.

2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat yang tertarik mengetahui mengenai kondisi perpolitikan di Kota Makassar terkhusus relasi politik organisasi Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto.
- b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membicarakan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini peneliti menguraikan teori serta konsep yang berkaitan dengan : **“Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral. Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 & 2020”**. Peneliti akan menggunakan teori Civil Society untuk menggambarkan kondisi ideal dari masyarakat madani. Selanjutnya digunakan pula konsep CSO dalam relasi politik kekuasaan untuk melihat bagaimana kedua pihak saling membangun saling mendukung satu sama lain agar tercapainya tujuan kedua pihak ataupun tujuan bersama kedua belah pihak.

2.1 Literatur Review

Penelitian yang penulis lakukan berjudul **“Civil Society dalam Kontestasi Politik Elektoral. Studi Kasus : Relasi Politik Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020”**. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana relasi politik yang dibangun Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto di Pilwali Makassar tahun 2018 & 2020 serta melihat bagaimana Civil Society memandang dan menempatkan diri pada kontestasi politik elektoral. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam Menyusun karya tulis ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Febryna Mulya yang berjudul "Transformasi CSO : Perspektif Perubahan Sistem."

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana posisi Civil Society Organization menempatkan dirinya dalam politik praktis hari ini. Adapun latar belakang penelitian ini adalah pasca perjuangan melawan rezim terjadi transformasi politik CSO ke berbagai sektor politik terutama adalah partai politik. CSO sebelumnya memainkan peran penguatan bargaining position masyarakat dalam melawan politik rezim Orba. Setelah rezim hancur, CSO dihadapkan dengan persoalan perubahan politik yang demokratis, yang mengakibatkan CSO mulai terbelah.

Penelitian ini menitikberatkan pada banyak tokoh-tokoh dari CSO yang terjun pada pemilu tahun 2009, serta banyaknya CSO yang berafiliasi dengan institusi politik dan aktor politik. Dalam penelitiannya, penulis mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terjadi pro dan kontra dalam melihat situasi ini. Kelompok yang menerima hal ini berdalih bahwa kebutuhan akan pemenuhan kepentingan kelompok memaksa afiliasi harus terjadi. Kurangnya kekuatan politik dalam mengawal aspirasi membuat dukungan dari institusi politik maupun aktor politik menjadi penting.

Sementara kelompok yang kontra menilai kondisi ini sebagai melemahnya ideologi yang dibawa oleh CSO. Aksi ini secara tidak langsung mematikan peran CSO sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Menurut hasil penelitian ini, terdapat pola berbeda antara di Sumatera Utara, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan dalam melihat persoalan ini. Dimana, di Sumatera Utara transformasi politik aktivis CSO merupakan pikiran kolektif aktivis CSO Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari adanya kelompok CSO, pertemuan yang membahas intensif pencalonan para aktivis CSO secara bersama. Di Yogyakarta dan di Sulawesi Selatan hal ini tidak ditemukan, transformasi merupakan bentuk dari gerakan individu semata.

Jika melihat dari hasil dan tujuan penelitian yang dipaparkan, penelitian ini semata-mata bertujuan menggambarkan bagaimana kondisi CSO pada pilkada tahun 2009. Gambaran akan transformasi yang terjadi di tubuh CSO dilakukan dengan skala nasional sehingga refleksi dengan realitas politik lokal kurang menggambarkan. Fokus studi dalam melihat bagaimana sejatinya relasi yang dibangun antara CSO dengan institusi politik maupun tokoh politik tertentu tidak dituangkan dalam penelitian yang dilakukan. Sehingga terjadi kepincangan dalam menerapkan

kondisi CSO dengan detail. Kekurangan ini kemudian menjadi landasan penyempurnaan penulis ingin melihat bukan hanya bagaimana CSO menempatkan diri dalam kontestasi politik tetapi bagaimana relasi politik yang dibangun CSO dan aktor politik.

2. Penelitian kedua ditulis oleh Naomi Susanti dengan judul “Peran GP Ansor dalam Pilkada : Studi Mobilisasi Politik Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015”.

Dalam penelitiannya, Naomi Susanti mencoba menggambarkan bagaimana salah satu CSO dalam hal ini GP Ansor mengambil peran dalam kontestasi politik electoral. Penelitian ini mengungkap mengenai peran GP Ansor dalam mendukung salah satu pasangan pada pilkada dengan melihat pengaruh organisasi kemasyarakatan sebagai instrumen penting dalam mobilisasi dan partisipasi. GP Ansor sebagai salah satu organisasi dibawah naungan NU yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia membangun pendekatan yang erat dengan hubungan keagamaan.

Dalam tulisannya, Naomi Susanti menjelaskan bagaimana GP Ansor dalam proses dukungan politik yang dibangun kepada pasangan calon Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin dalam pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

Kehadiran GP Ansor dalam mendukung pasangan calon ini membawa dampak yang cukup besar terlebih melihat organisasi ini yang memiliki jumlah massa yang sangat besar. Hal tersebut berhasil mengantarkan pasangan calon Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin menjadi pemenang.

Penelitian ini mengungkap adanya ikatan sosial dan kultural antara GP Ansor dengan kandidat yang didukung. Meskipun dibungkus dengan gambaran mobilisasi politik, penelitian ini lebih berfokus pada alasan GP Ansor mendukung kandidat tertentu. GP Ansor yang memiliki massa yang besar digunakan sebagai pion-pion politik praktis pada pilkada. Peneliti juga mengungkap fakta bahwa rata-rata anggota DPRD di daerah tersebut merupakan kader dari GP Ansor itu sendiri. Sebagai hasil dari dukungan besar yang diberikan.

Dalam temuan penelitian juga diungkapkan bahwa GP Ansor melihat momen pilkada untuk mendekatkan diri pada kuasa demi kepentingan kelompoknya. GP Ansor juga melihat pilkada sebagai sebuah peluang untuk semakin menanamkan pengaruhnya yakni menguatkan syariat-syariat Islam. Mobilisasi yang dilakukan oleh GP Ansor merupakan Analisa politik yang dalam karena dari hasil wawancara, keputusan untuk memilih kandidat Saiful Ilah dan Ahmad

Syaifuddin karena mempunyai potensi terbesar dalam memenangkan pilkada dan mengawal kepentingan kelompok.

Dengan memanfaatkan posisinya sebagai sebuah CSO, GP Ansor membangun jejaring politik berupa jaringan kekerabatan dan ikatan kesamaan agama sebagai tarikan untuk memperoleh partisipasi dan dukungan politik. Naomi dalam tulisannya secara eksplisit menggambarkan bagaimana strategi CSO dalam kontestasi politik electoral. Kendati demikian, relasi politik yang kemudian dibangun antara GP Ansor dan Kandidat tidak tergambarkan dengan baik diluar dari strategi pemenangan yang dilakukan. Hal ini juga menjadi penekanan bagi penulis untuk menghadirkan gambaran terkait relasi politik yang dibangun antara CSO dan Aktor Politik.

2.2 Civil Society

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani². Masyarakat madani dapat didefinisikan

² Parmudi, Mochamad. 2015. Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. Jurnal at Taqaddum. Volume 7. Hal. 302.

sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Civil society merupakan bagian dari prosesi sejarah masyarakat barat yang dapat ditinjau bahkan hingga era Cicero yang menggunakan istilah *societies civilis* dalam menggambarkan civil society. Dalam perkembangannya, civil society bahkan pernah dipahami sebagai suatu paham radikal oleh para pemikir politik karena posisinya yang dianggap mandiri dan berbeda dengan negara. Civil society sebagai ruang politik hadir untuk menjamin keberlangsungan ruang public yang bebas dan mandiri³.

Civil society secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri serta dapat secara aktif dan bebas dalam wacana maupun praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan problematika kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk didalamnya pengelompokan yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi-organisasi sukarela, ataupun organisasi bentukan negara yang secara aktif melayani kepentingan masyarakat sebagai perantara antara negara dan masyarakat.

³ Hikam, As Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES. Hal 3.

Sejalan dengan kedudukannya sebagai suatu yang mandiri dan berkedudukan tidak sama dengan negara, civil society dapat dilihat sebagai sebuah entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi. Kekuatan politik ini kemudian mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari kecenderungan-kecenderungan intervensi negara. Pada saat yang bersamaan, kehadiran civil society juga mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat yang mencegah atau mengurangi konflik-konflik internal⁴. Oleh karena itu, keberadaan civil society sejalan dengan sifat-sifat demokrasi yang mendukung ruang public yang bebas, posisi individu-individu di masyarakat setara, serta mengawal suara-suara masyarakat dari berbagai kalangan.

Meski hadir sebagai sebuah entitas yang mencakup semua golongan, pergerakan civil society di Indonesia sangat erat dengan politik arus bawah. Politik arus bawah sendiri diartikan sebagai sebuah kesatuan Gerakan masyarakat-masyarakat kelas bawah dalam sebuah kegiatan partisipasi politik. Adanya civil society memperbesar akses politik masyarakat kelas bawah. Perkembangan politik arus bawah mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya civil society di suatu negara⁵.

⁴ *Ibid.* Hal 89.

⁵ *Ibid.* hal 132.

2.2.1 Ciri-Ciri Civil Society

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam civil society, yaitu sebagai berikut:

1) Partisipasi rakyat.

Rakyat dalam sebuah civil society tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri dengan berpartisipasi dalam mengawal suaranya sehingga tingkat partisipasi cenderung lebih tinggi.

2) Otonom.

Civil society diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.

3) Tidak bebas nilai.

Civil society sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum. Sehingga civil society sangat terikat dengan nilai-nilai tertentu.

4) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Civil society harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA

5) Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

Civil society sebagai sebuah komunitas juga memiliki ciri yakni selalu memposisikan dirinya di atas keluarga dan di bawah negara. Bentuk lain dari civil society dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas dan juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam

kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.

2.2.2 Elemen-Elemen Dalam Civil Society

Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari civil society yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut yaitu:

1) Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan atau Civil Society Organization (CSO) adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (Civil Society) yang termasuk dalam kategori Non-Government Organization (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. Organisasi kemasyarakatan didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara.

Organisasi kemasyarakatan juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah diimplementasikan⁶. Organisasi ini sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

2) Pers dan Media Massa

Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social control. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, pers akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

⁶ Hanifie, Haniah dan Azmy, Ana Shabana. 2018. *Kekuatan-kekuatan Politik*. Depok : Rajawali Pers. Hal 38.

Sedangkan bagi masyarakat, pers akan memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan⁷.

3) Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

4) Perguruan Tinggi (Mahasiswa)

Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang hadir dalam manusia-manusa golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa sebagaimana perannya sebagai agent of change diharapkan

⁷ *Ibid.* Hal 78.

mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

5) Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Sejatinya partai politik berangkat dari anggapan untuk membentuk sebuah wadah organisasi guna menyatukan orang-orang dengan berbagai macam pemikirannya untuk dilakukan konsolidasi yang kemudian dikawal agar mampu terealisasikan⁸.

2.2.3 Civil Society dan Politik Arus Bawah

Secara historis, politik arus bawah atau sering disebut dengan *grassroot politics* dapat dilihat Kembali pada awal abad ke-19 ketika kesadaran protonasionalis melalui berbagai perlawanan terhadap colonial atau akrab disebut anti colonial di seluruh penjuru Indonesia⁹. Gerakan masyarakat ini secara massive memulai memperlihatkan dirinya dan secara bertahap masuk kedalam sebuah Gerakan politik alternatif yang

⁸ Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 403.

⁹ S. Kartodirdjo. 2015. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta : Pustaka Jaya.

baru. Kemunculan Gerakan politik baru ini mampu dengan baik menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat karena memberikan suatu ciri baru dalam Gerakan politik arus bawah. Gerakan ini mengedepankan sifat lokal dan bukan merupakan Gerakan yang berorientasi pada kelas masyarakat tertentu atau non kelas.

Namun demikian, kehadiran Gerakan arus politik ini tetap tidak mampu memberikan pengaruh yang berarti atau muncul sebagai suatu kekuatan yang menentukan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Disaat yang bersamaan, era ini juga menyajikan munculnya Gerakan civil society yang modern di Indonesia. Hal ini banyak dipengaruhi oleh lahirnya aktivis-aktivis intelektual dan berkembangnya pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam proses perpolitikan di Indonesia¹⁰. Sayangnya, kemunculan civil society semacam ini belum mampu berkembang dengan baik karena terhadang pada sedikitnya kelas elit di perkotaan yang memandang bahwa Gerakan ini memiliki makna perjuangan yang layak. Gerakan ini sejatinya mengalami pasang surut yang Panjang dan terus berlangsung hingga hari ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa perjuangan untuk pemulihan dan revitalisasi civil society sebagai suatu prakondisi demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses Panjang dan terus terbuka. Sejauh masyarakat tetap tidak mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan menjadi lebih mandiri, maka prospek pemulihan civil

¹⁰ As Hikam. Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES. Hal 121

society akan selalu suram. Dalam telaah kondisi di Indonesia hari ini, hubungan negara dan masyarakat dapat dikatakan tidak ideal dan pola ini cenderung akan membawa kondisi menuju negara birokratis-otoriter. Sebagai akibatnya, demokrasi yang menjunjung sikap partisipatoris sebagaimana dicanangkan oleh Moh.Hatta akan semakin menjauh.

Negara hari ini selalu dihadapkan akan problematika yang berkaitan dengan hak asasi, partisipasi masyarakat, perwakilan, keadilan, pemerataan ekonomi dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini sejatinya merupakan salah satu alasan dari lahirnya civil society. Proses demokratisasi dapat muncul melalui pencarian kemandirian yang lebih luas bagi masyarakat dalam membantu menghadapi tekanan terhadap negara dari berbagai tuntutan permasalahan diatas.

Namun demikian, pemberdayaan politik masyarakat arus bawah harus dilindungi dari berbagai kegiatan atau proses mobilisasi politik praktis. Penekanan Gerakan politik bawah harus berfokus pada revitalisasi kesadaran diri dan pengembangan kemandirian politik masyarakat yang merupakan ciri dari civil society. Pemberdayaan politik arus bawah harus hadir dalam mendorong transformasi sosial dimana agen diberikan peran utama. Dengan mengedepankan kemandirian, pemberdayaan dapat hadir dengan memiliki akar yang kuat karena memberikan pemahaman atas realitas sosial dan politik. Pada saat yang

bersamaan kondisi ini membuka kemungkinan refleksi kritis yang berkaitan dengan kapabilitas dalam meluaskan jangkauan politik¹¹.

Perjalanan dari Gerakan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana negara hadir dalam memberdayakan masyarakat arus bawah. Tugas yang ada didepan mata adalah bagaimana membangun pendekatan berbasis sosial yang berjalan seiringan dengan perluasan ruang public yang menjadi tempat dari berbagai pembahasan terkait diskursus politik. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian dan mendorong pengembangan diri masyarakat yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menyadari posisinya dalam berbagai aspek dan tatanan sosial politik. Kesadaran ini akan secara langsung berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam partisipasi politik secara penuh sebagai warga negara.

2.3 Civil Society Organization

Secara umum Civil Society Organization atau CSO didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang terbagi menjadi organisasi massa, organisasi rakyat, organisasi profesi, organisasi komunitas dan organisasi Non-Government (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Istilah Civil Society Organization atau CSO dianggap sebagai institusi “third section” yang berbeda dengan instansi pemerintah maupun swasta.

¹¹ As Hikam. Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LP3ES. Hal 130

Civil Society Organization hadir sebagai institusi yang melakukan manifestasi Gerakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat secara umum serta para fungsionaris dari institusi Civil Society Organization (CSO) harus bersifat independen dari pengaruh pemerintah. Gramsci berpendapat bahwa Civil Society Organization sebagai kumpulan organisme “privat”, berbeda dengan negara yang disebut sebagai masyarakat politik (Political Society). Singkatnya Gramsci memaknai Civil Society sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang/pekerja, dan lembaga Pendidikan.

Sementara negara adalah institusi-institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi dan tentara. Gramsci, seperti dikutip oleh Luiz Carlos Bresser-Pereira dalam “State, Civil Society and Democracy Legitimacy”, mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil; *“the state should be understood not only as the apparatus of the government, but also the private apparatus of Civil Society”* (negara tidak harus dipahami hanya sebagai Lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).¹²

2.4 Relasi Politik CSO dengan Institusi dan Aktor Politik

Jika ditilik dari hubungan antara civil society dengan negara, maka dapat didefinisikan bahwa kehadiran Civil Society Organization merupakan kekuatan penyeimbang agar tidak terjadi dominasi sepihak

¹² Luiz Carlos. 1994. *State, Civil Society and Democracy Legitimacy*. Jurnal Online diakses pada tanggal 6 november 2021

dari negara dan institusi politik. CSO berperan untuk memastikan negara tidak memiliki kekuatan mutlak sehingga terdapat pihak yang dapat terus berjuang untuk hak-hak masyarakat sipil. CSO sendiri pada hakikatnya merupakan organisasi yang lahir dari masyarakat yang bersifat mandiri serta tidak memiliki ketergantungan terhadap negara maupun pemerintah.

Kemandirian ini pada prinsipnya meliputi banyak aspek baik segi ekonomi maupun sarana dan prasarana. Kendati demikian, keaslian ini pada praktiknya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Posisi dari CSO yang selalu bersinggungan dengan pemerintah maupun institusi politik lainnya membuat realitas berkata lain. Proses pemenuhan kebutuhan kelompok atau organisasi seolah selalu membuat CSO memiliki ikatan tersendiri dengan panggung politik praktis. Dalam bukunya yang berjudul Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Arfan Gaffar menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 peran yang dimainkan oleh CSO yaitu ¹³:

1. Meningkatkan pengaruh politik secara luas
2. Mengambil bagian dalam mengawal agenda pembangunan
3. Mendukung dan memastikan terciptanya keadilan yang merata di lapisan masyarakat

¹³ Arfan Gaffar. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka pelajar, Yogyakarta. Hal 203.

Perjalanan dari CSO dalam mengawal kepentingan makin hari makin mengalami pergeseran yang begitu nyata. Kehadiran CSO dinilai oleh banyak pihak telah melupakan misi utamanya sebagai penyeimbang kuasa dan pengawal kepentingan masyarakat. Sejalan dengan bergesernya pemahaman akan jati dirinya, kondisi ini juga membuat banyak politisi yang melihat CSO sebagai sebuah mesin pendulang suara dalam kontestasi politik. Posisi dan sikap dari banyak organisasi ini dapat dilihat dari isi dan pendekatan yang dibangun oleh CSO terhadap pemerintah ataupun politisi yang dianggap memiliki pengaruh.

Proses mewujudkan pemikiran akan masyarakat yang madani membuat kerja-kerja CSO tidak bermain pada suatu ruang hampa yang sarat akan kepentingan melainkan ruang politik yang dibanjiri oleh banyak kepentingan. Hal tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dimana para aktor di dalamnya terus berjuang dalam proses pemenuhan kepentingan masing-masing individu atau kelompok. Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya relasi politik antara pemerintah dan CSO.

Terdapat 4 dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa relasi politik CSO dan Pemerintah atau aktor politik, yakni :

1. Dimensi orientasi atau ideologi, relasi politik dalam sudut pandang dimensi ini dilandasi oleh kesamaan dalam orientasi pergerakan yang dilatarbelakangi oleh tarikan kesamaan

ideologi. Dalam praktiknya, pendekatan dimensi ini cukup jarang ditemui karna tarikan ideologi seorang aktor politik seringkali tidak menentu dan menyesuaikan dengan kebutuhan kontestasi.

2. Dimensi finansial, relasi politik antar CSO dengan aktor politik maupun institusi politik yang dilatarbelakangi oleh faktor finansial didasari atas kebutuhan organisasi yang didukung oleh aliran finansial dari actor maupun institusi politik. Relasi ini cukup banyak ditemukan karena kondisi realitas lapangan yang mengharuskan organisasi mencari sokongan dana dalam menjalankan kerja-kerja organisasi.
3. Dimensi organisasional, pendekatan organisasi yang didasari oleh pendekatan ini dilatarbelakangi oleh structural organisasi. Kondisi ini biasanya muncul apabila seorang aktor politik merupakan bagian baik secara struktural kepengurusan ataupun sekedar merupakan kader dari organisasi tertentu.
4. Dimensi persoalan kebijakan.pendekatan dimensi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh actor ataupun institusi politik yang sejalan atau sepaham dengan kebijakan yang dikawal oleh CSO.

Masing-masing dimensi merupakan sumber relasi politik antara CSO dan Pemerintah maupun aktor politik, karena masing-masing pihak

umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing¹⁴. Salah satu nafas perjuangan dari terbangunnya relasi politik CSO dan pemerintah atau aktor politik adalah menuntut hubungan kedua belah pihak yang bekerjasama dalam melahirkan kebijakan yang bermutu. Hal ini kemudian melahirkan diskusi terkait mekanisme dan jenis hubungan seperti apa yang seharusnya dibangun antara CSO dengan pemerintah ataupun actor politik.

Menurut pengertian dari hasil akumulasi atas beberapa pandangan terkait konsep relasi, istilah relasi merujuk pada beragam bentuk hubungan atau ikatan yang timbul baik pada individual masyarakat, kelompok, ataupun sebuah sistem politik. Dalam banyak hal, relasi ini bersifat organisasional sebagai bentuk jalinan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam contoh yang lain, relasi ini juga eksis pada hubungan yang dibangun oleh suatu kelompok masyarakat atau CSO dengan aktor politik tertentu.

Setidaknya terdapat tiga pemikiran utama terkait konsep relasi politik yang dibangun oleh Civil Society Organization dengan Pemerintah maupun aktor politik¹⁵ :

1. Harus terdapat garis tegas dalam membangun relasi antara CSO dengan Politisi

¹⁴ Suharko. 2005. Merajut Demokrasi. Tiara Wacana. Yogyakarta. Hal 36

¹⁵ Suharko. 2005. Merajut Demokrasi. Tiara Wacana. Yogyakarta

2. CSO adalah oposisi abadi dari Pemerintah
3. Relasi yang dibangun semata-mata untuk mendukung lahirnya kebijakan yang baik

Muhammad Budairi merumuskan kategori atau tipe relasi Civil Society Organization dengan institusi atau aktor politik yang lebih spesifik yaitu¹⁶:

1) Integrasi/korporatis

Integrasi atau korporatis adalah sebuah kategori relasi dimana Civil Society Organization menjadi sebuah partisan. Kategori ini juga dimaknai dimana Organisasi Civil Society dijadikan basis massa atau alat dari aktor atau instansi politik yang dimanfaatkan dalam arena kontestasi

2) Kolaborasi/aliansi

Relasi kolaborasi atau aliansi adalah relasi yang dibangun Civil Society Organization dengan instansi atau aktor politik yang bersifat non partisan atau independent. Bentuk relasi ini menjadikan posisi dari Civil Society Organization sebagai instrumen Gerakan sosial untuk melakukan berbagai advokasi dan pengawalan dari kebijakan-kebijakan pemerintah\

¹⁶ Budairi, Muhammad. 2002. *Masyarakat Sipil dan Negara*. Yogyakarta : Law Indonesia Kreasi Wacana. Hal 134-140

3) Clientelistic

Klientalistik disini dimaksudkan posisi antara Civil Society Organization dan institusi atau aktor politik terjalin dengan erat dan dekat. Relasi ini juga terbentuk karena hubungan personal maupun parokial dan terjadi pertukaran ekonomi-politik yang saling menguntungkan, dimana Civil Society Organization memperoleh keuntungan secara nilai ekonomis, sementara instansi atau aktor politik meraih keuntungan dukungan secara politik.

4) Oposisi/konfrontasi

Relasi oposisi atau disebut juga relasi konfrontasi adalah relasi antara Civil Society Organization dengan institusi atau aktor politik yang saling bertentangan satu sama lain. Civil Society Organization mengambil sikap non-partisan dan independen secara organisasi serta cenderung menunjukkan perlawanan terhadap institusi atau aktor politik. Sikap ini didasarkan kepada keyakinan bahwa partai politik dianggap cenderung korup dan tidak Amanah terhadap tanggungjawabnya.

Gambar 2.1



Gambar diatas menunjukkan spektrum yang menggambarkan bentuk relasi politik antara Civil Society Organization dengan institusi dan actor politik. Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa semakin kekanan posisi relasi Civil Society Organization maka semakin positif dan baik relasi tersebut. Sedangkan semakin ke kiri posisi relasi yang dibangun Civil Society Organization dengan institusi dan actor politik maka semakin negatif pola pola hubungan yang dibangun.

2.5 Peran dan Fungsi Civil Society Organization

Civil Society Organization merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyebutkan bahwa salah satu aspek yang penting dalam membangun demokrasi di Indonesia adalah meningkatkan peran Civil Society secara aktif dalam pembangunan serta mandiri dan otonom.

Makna otonom dan mandiri disini dimaksudkan sebagai bentuk yang dapat memajukan diri sendiri, dan dapat membatasi diri dari “intervensi” negara atau pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta senantiasa memperhatikan sikap kritis dalam kehidupan politik. Hal ini diperkuat oleh Otho H.Hadi yang menyebutkan ada dua aspek yang harus dimiliki oleh gerakan Civil Society yaitu keswadayaan (self supporting), dan keswasembadaan (self generating).

Civil Society merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab seperti keluarga, asosiasi seperti kelompok sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengetahuan dan mobilisasi diri. Lebih jauh secara prinsip Civil Society Organization berperan untuk memperkuat peran kehidupan bermasyarakat. Peran memperkuat itu tentu tak mudah, dimana Civil Society Organization menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi.

Umumnya kalangan aktivis Civil Society Organization memberikan penjelasan bahwa peran dan fungsi Civil Society Organization adalah memperjuangkan kebutuhan dasar atau publik masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Caranya melalui advokasi, memfasilitasi dan mediasi agar terpenuhi kebutuhan dasar/publik bagi masyarakat. Pandangan lainnya dari kalangan aktivis menjelaskan peran dan fungsi Civil Society Organization, dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah meliputi aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat yang meliputi aspek pribadi dan aspek antar pribadi. Lembaga kemasyarakatan yang merupakan penyatuan dari aspek kehidupan pribadi didasarkan pada upaya pemenuhan atau pencapaian kepentingan pribadi yang dilakukan secara Bersama sama.

Bahkan peran dan fungsi Civil Society Organization bisa diposisikan membantu kerja-kerja pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan. Tentunya harus diiringi dengan trust dan partnership yang kuat dari kedua belah pihak. Sehingga menghasilkan sinergisme dan keselarasan kerja secara bersama-sama demi kepentingan publik atau masyarakat banyak yang memerlukan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Diskursus terkait implementasi Civil Society di negara dengan iklim demokrasi sejatinya telah mengalami pasang surut. Keberadaan Civil Society dianggap sebagai sesuatu yang natural dan lahir atas proses interaksi dari masyarakat dalam ruang public yang bebas dan dijamin oleh Negara (Demokrasi). Indonesia sampai hari ini menjadi salah satu negara yang dianggap menarik untuk melihat keberadaan dan perkembangan dari Civil Society. Dari sudut pandang institusional, Civil Society juga diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat yang secara aktif dan bebas mengawal segala problematika kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya. Secara kedudukan, Civil Society menempatkan dirinya tidak sama dengan negara melainkan sebagai sebuah kekuatan penyeimbang guna menghindari dominasi kuasa.

Civil Society kemudian memanifestasikan dirinya dalam wujud kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau dalam pandangan Civil Society disebut dengan Civil Society Organization (CSO). CSO ini berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan

program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. Organisasi ini sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Dalam perkembangannya, kekuatan Civil Society menjadi pendorong perubahan dalam ranah kenegaraan. Civil Society menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses perumusan kebijakan, kondisi inilah yang menjadikan Civil Society untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat. Hadirnya CSO sendiri tidak jarang mengalami perubahan implementasi dan secara terang-terangan terjun dalam politik praktis. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila di Kota Makassar yang membangun relasi dengan Danny Pomanto. Relasi ini kemudian membawa Pemuda Pancasila pada persimpangan yang membuat mereka harus mengalami beberapa pergeseran dari tujuan awal. Kepentingan politik praktis seringkali dibenturkan pada peran dan fungsi Civil Society Organization. Benturan kepentingan ini sayangnya seringkali didominasi oleh kepentingan elit sehingga seolah mengalahkan peran dan fungsi organisasi.

Kehadiran Pemuda Pancasila dalam kontestasi politik electoral tidak terlepas dari proses pemenuhan tujuan organisasi. Kedua pihak sejatinya melihat peluang dengan membangun relasi politik yang kokoh guna

memenangkan kontestasi yang berujung pada pengawalan aspirasi kelompok. Pemuda Pancasila mampu melahirkan partisipasi masyarakat yang berdampak pada tumbuhnya angka partisipasi politik yang diharapkan. Tidak berhenti pada Pilwali 2018, Gerakan ini Kembali mempertontonkan kebolehnya dalam Pilwali 2020. Kondisi ini sejatinya menimbulkan suatu tanda tanya terkait masa depan relasi politik yang dibangun oleh Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto. Proses dalam mewujudkan kepentingan kelompok diharapkan berujung pada pengaruh yang dibawa dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga relasi politik akan terus terjaga.

Berbagai kondisi serta faktor menguntungkan yang dimiliki pemuda Pancasila ditambah dengan masyarakat yang resah akan pertain politik membuat jalannya mobilisasi politik semakin efektif. Secara sistematis kondisi tersebut membentuk sebuah kerangka pikir dalam penelitian ini. Penekanan dalam tulisan ini akan melihat bagaimana relasi politik yang terbangun antara Pemuda Pancasila dan Danny Pomanto serta factor-faktor apa saja yang memengaruhi relasi ini. Sejalan akan tujuan mulia dari CSO adalah menjadi kekuatan penyeimbang dalam mempengaruhi proses lahirnya kebijakan yang adil untuk masyarakat. Penulis juga akan menggambarkan terkait bagaimana Pemuda Pancasila sebagai CSO dalam sudut pandang Civil Society pada tarikannya dengan politik praktis. Sebuah kondisi yang sampai hari ini menuai dilemma pro kontra di

masyarakat dan implementasi dari Civil Society di tubuh pemuda Pancasila kedepannya.

2.7 Skema Pikir

